

Judul : Waspada Hoaks Era Digital Komisi I Ajak Masyarakat Cerdas Gunakan Medsos
Tanggal : Kamis, 19 Februari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Waspada Hoaks Era Digital

Komisi I Ajak Masyarakat Cerdas Gunakan Medsos

SENAYAN menekankan pentingnya disiplin verifikasi dan prinsip jurnalistik yang ketat untuk melawan maraknya berita hoaks atau palsu di ruang digital.

Anggota Komisi I DPR Amelia Angraini menyampaikan, Indonesia saat ini merupakan salah satu negara dengan penetrasi internet terbesar di dunia. Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat, penetrasi internet telah menembus lebih dari 80 persen atau sekitar 229 juta pengguna.

Dari jumlah itu, lebih dari 140 juta aktif di media sosial (medsos). Dunia digital menjadikan medsos sebagai ruang publik utama, sekaligus membuka peluang terjadinya polusi informasi dalam skala masif. Sehingga dikhawatirkan angka hoaks di dunia digital semakin.

Dia menyebut selama tahun 2023 tercatat sebanyak 2.330 konten hoaks mayoritas bermuatan politik. Sedangkan sepanjang tahun 2024 sebanyak 1.923 konten. Data ini bukan untuk membuat panik, tetapi supaya semua pihak sadar hoaks bukan gangguan kecil.

"Ini risiko sistemik, bahkan secara global disinformasi masuk kategori risiko jangka pendek paling serius," ujar Amelia dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema "Waspada Berita Hoax di Media Sosial: Cerdas Menjalin Informasi" di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Amelia mengatakan, hoaks dirancang memancing emosi sehingga menyebar lebih cepat daripada berita faktual. Karena itu, tugas jurnalis adalah memastikan kebenaran didukung metode, standar operasional prosedur (SOP), dan etika yang tepat.

Di era digital, lanjutnya, berita menyebar dalam hitungan detik. Tapi kebenaran membutuhkan disiplin. "Disiplin itu dalam dunia jurnalistik disebut verifikasi," ujarnya.

Untuk itu, ia mengingatkan formula 5W+1H sebagai "rem keselamatan" dan prinsip *cover both sides* dan bukan sekadar formalitas. Hal ini sebagai prasyarat sebelum tayang, terutama untuk berita investigasi atau tuduhan yang merusak reputasi pihak lain. Diketahui, 5W+1H adalah *What* (Apa), *Who* (Siapa), *Where* (Dimana), *When* (Kapan), *Why* (Mengapa), dan *How* (Bagaimana).

Amelia menekankan tiga prinsip operasional untuk menghadirkan berita berkualitas. Yaitu, jangan publikasikan sebelum diklarifikasi, klarifikasi sebagai perlindungan bukan pembeneran kesalahan dan hindari sensasi. Selanjutnya untuk menghindari sensasi harus menerapkan 3 hal. Yaitu, fakta jelas, sumber jelas, dan framing adil.

Selain itu, ia mengingatkan tantangan baru berupa manipulasi visual dan *artificial intelligence* (AI) atau kecerdasan buatan yang



Amelia Angraini

memudahkan pembuatan konten palsu. Apalagi di era algoritma seperti sekarang ini, klarifikasi sering menyebar lebih lambat dibanding hoaks. "Maka verifikasi harus jadi prioritas nomor satu," tandas politikus Nasdem ini.

Amelia menambahkan, kualitas informasi berkaitan langsung dengan keamanan nasional, kohe-si sosial, dan demokrasi. Sehingga hoaks bisa menjadi senjata perang untuk pemecah belah.

Dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Disinformasi dan RUU Pertahanan Digital, ia mendorong keseimbangan antara penegakan aturan dan perlindungan kebebasan berekspresi. "Jangan sampai obatnya lebih berbahaya daripada penyakitnya," tandasnya.

Kunci mengatasi hoaks adalah kolaborasi antara jurnalis, pemeriksa fakta, platform digital, Pemerintah, dan masyarakat. Karena

itu, di era digital, tidak hanya melawan hoaks, tapi juga menjaga martabat di ruang publik.

Ia mengingatkan bahaya penyebaran hoaks dan disinformasi di medsos yang berpotensi menjadi alat merintang penegakan hukum. Termasuk dalam kasus tindak pidana korupsi (tipikor). "Narasi menyesatkan di medsos dapat membentuk opini publik yang bias, bahkan berpotensi mengganggu proses hukum," kata dia.

Di tempat sama, anggota Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno menyoroti pesatnya perkembangan teknologi digital dan medsos di Indonesia yang membawa dampak besar, baik positif maupun negatif, terhadap kehidupan masyarakat.

Dia mengungkapkan, sekitar 80 persen populasi Indonesia aktif menggunakan internet dan medsos dengan durasi minimal tiga jam per hari. Arus informasi yang masif tersebut, memberikan manfaat besar, namun juga menghadirkan tantangan serius.

"Dampak negatif baik besar atau kecil tergantung bagaimana masyarakat memanfaatkan informasi tersebut," ujar Dave di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Dave menyampaikan, kemajuan teknologi seperti AI turut mempercepat penyebaran hoaks dan disinformasi. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), tercatat sekitar 1.020 isu hoaks beredar sepanjang

Januari hingga Agustus 2025.

Selain itu, penggunaan teknologi seperti *deepfake* atau manipulasi video dan digital *scam* atau penipuan digital dinilai semakin mempermudah peredaran informasi palsu dalam jumlah besar dan waktu singkat.

Ia mengungkapkan, isu politik dan pemerintahan menyumbang sekitar 30 persen dari total hoaks yang beredar, dan berdampak langsung pada stabilitas nasional serta menurunkan kepercayaan publik terhadap Pemerintah. Hoaks juga berpotensi memecah persatuan dan kesatuan bangsa, membentuk polarisasi di tengah masyarakat, serta menurunkan kepercayaan terhadap Pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif.

Selain itu, derasnya banjir konten di medsos yang dikemas dengan berbagai cara menggunakan teknologi terkini. Kondisi ini membuat proses verifikasi fakta semakin sulit, terlebih dengan algoritma medsos yang cenderung memprioritaskan konten sensasional. Akibatnya, informasi palsu dapat menyebar hingga enam kali lebih cepat dibanding informasi yang telah terverifikasi.

Untuk itu, ia menegaskan pentingnya peningkatan literasi digital di tengah masyarakat. Pemerintah bersama DPR akan terus mendorong edukasi publik agar lebih kritis dan terbiasa melakukan verifikasi sebelum mempercayai informasi. ■ TIF